

Pengabdian Pada Masyarakat dengan Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dalam Upaya Ikut Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Wiwin Windihastuty¹, Krisna Adiyarta², Wendi Usino³

^{1,2,3}Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Email Korespondensi: wiwin.windihastuty@budilluhur.ac.id

Received 30 Juni 2021, Revised 28 Juli 2021, Accepted 25 Agustus 2021

ABSTRAK

Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) Universitas Budi Luhur (UBL) sebagai pelaksana dalam bidang Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat, dituntut untuk berperan aktif tidak hanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi turut serta dalam kegiatan masyarakat. DPRD yang terdiri dari berbagai macam latar belakang membutuhkan peningkatan skill, perubahan sikap, perilaku, korelasi terhadap kekurangan – kekurangan kinerja untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui pelatihan atau salah satunya bimbingan teknis. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh DRPM Universitas Budi Luhur adalah mengadakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), dengan memfasilitasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Workshop dan Bimbingan Teknis dalam upaya ikut meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Anggota DPRD. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara serta data lapangan dengan analisis PLS (Partial Least Square) menggunakan sampel sebanyak 41 orang. Kegiatan Workshop dan Bimtek yang telah dilaksanakan dengan lancar sampai hari terakhir dan diwarnai dengan diskusi aktif antara Pimpinan dan Anggota DPRD bersama para narasumber. Melalui workshop dan bimbingan teknis, memberikan manfaat pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Kata kunci : bimbingan teknis, workshop, DPRD, mitra, narasumber

ABSTRACT

The Directorate of Research and Community Service (DRPM) Budi Luhur University (UBL) as the executor in the field of Research and Community Service, is required to play an active role not only in developing science and technology but also participating in community activities. DPRD which consists of various backgrounds requires skill improvement, changes in attitude, behavior, correlation to performance deficiencies to improve performance and productivity through training or technical guidance. One of the efforts that have been made by the Budi Luhur University DRPM is holding Community Service (PPM) activities, by facilitating the Provincial and Regency/City DPRD's in carrying out Workshops and Technical Guidance in an effort to participate in improving the quality of Human Resources for DPRD members. Quantitative methods are used to determine the relationship between two or more variables. Collecting data using observation, questionnaires, interviews and field data with PLS (Partial Least Square) analysis using a sample of 41 people. Workshop activities and technical guidance that have been carried out smoothly until the last day and are colored by active discussions between the Leaders and Members of the DPRD with the interviewees.

Keywords : *Include a maximum of five keywords or phrases*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Tujuan diselenggarakan Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak interpelasi; angket; dan menyatakan pendapat. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : pimpinan; komisi; Badan Musyawarah; Badan Anggaran; Anggaran Kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Komisi-Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan fungsi yang sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan, Komisi-Komisi lebih fokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya untuk dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD, kami menyelenggarakan Workshop dengan tema **“Penguatan Kapasitas DPRD Tentang Kebijakan Umum dan Pertanggungjawaban Anggaran”**.

Workshop dilaksanakan di sebuah hotel di Jakarta dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada anggota DPRD untuk mengunjungi sekaligus silaturahmi dengan Pimpinan dan Karyawan Kementerian Dalam Negeri Pusat. Sedangkan hotel sebagai tempat pelaksanaan dipilih dengan beberapa ketentuan seperti kenyamanan kamar, kesediaan ruang pelatihan serta biaya yang terjangkau.

Tujuan

Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan bimbingan teknis kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi mengenai pembaharuan tugas pokok dan fungsi DPRD yang berlaku saat ini, membekali peserta untuk menguatkan kapasitas tentang penyusunan KUA PPAS serta meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas tentang pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Penelitian Terdahulu

Menurut Ray Septianis Kartika, Garcy Simorangkir dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah (Jurnal Inovasi Kebijakan, 2019), Bimtek ini diadakan sebagai proses pembelajaran bagi fasilitator di daerah agar dapat mengoperasionalkan tujuh aplikasi layanan yang terintegrasi. Berdasarkan penelitian tersebut

kami mempublikasikan tidak hanya peserta tetapi juga untuk melihat pelaksanaan Bimtek dan kompetensi narasumber yang dilibatkan.

METODE

Rencana bimbingan teknis yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut: Lokasi tempat penelitian ini bertempat di Hotel Merlynn Park Jalan Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jumlah peserta penelitian sebanyak 41 orang, yang berasal dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertipe penelitian deskriptif dimana bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif dengan diperkuat dengan analisis kualitatif yang berupa pemaknaan.

Tema Dan Materi Pembahasan

Tema kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah “Peran DPRD Terhadap Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” dengan materi pembahasan antara lain:

1. Penerapan Pokok-pokok Pikiran dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020
3. Implementasi Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standard Harga Satuan Regional
4. Peran DPRD Dalam menindaklanjuti LHP BPK

Tahapan Pelaksanaan

Peleksanaan kegiatan bimbingan teknis ini, dilakukan dengan beberapa tahapan seperti yang divisualisasikan pada Gambar 1 dibawah ini



Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan tersebut jika narasikan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim yang akan menjadi pelaksana
2. Membuat proposal mengenai bimbingan teknis dan workshop
3. Membuat surat penawaran dan mengajukan kepada DPRD sasaran
4. Setelah surat permohonan diterima kemudian akan diajukan sesuai kebutuhan
5. Surat permohonan dikirim ke BPSDM Kemendagri untuk validasi dan persetujuan
6. Pengajuan nomor rekomendasi
7. Persiapan pelaksanaan dan pengajuan nara sumber

8. Pelaksanaan bimbingan teknis
9. Pengawasan jalannya bimbingan teknis
10. Membuat laporan

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Bimbingan Teknis dimulai dengan acara sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Budi Luhur, Pimpinan DPRD serta narasumber. Jalannya acara pembukaan seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2 Sambutan sekaligus Pembukaan

Peserta sangat antusias dalam mengikuti bimbingan teknis ini, materi demi materi diikuti dengan tekun dan pada setiap materinya selalu ditutup dengan pembahasan bersama serta tanya jawab. Jalannya bimbingan teknis seperti pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Jalannya Pelaksanaan Bimtek

Protokol Kesehatan (prokes) tetap dijalankan, seperti terlihat padagambar 3 dimana setiap peserta menempati 1 meja dengan tetap menggunakan masker selama kegiatan pelatihan berlangsung.

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini berjalan dengan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner berupa table seperti pada Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Bimbingan Teknis

Keterangan	SM	M	CM	KM	TM
Penguasaan materi narasumber dan pemanfaatan berbagai referensi dalam penyajian		28	2		
Kesempatan tanya jawab, ketepatan waktu dan sistematika penyajian		28	2		
Daya simpati, gaya dan sikap narasumber terhadap peserta		29	1		
Relevansi materi bimtek dengan pekerjaan		30			
Kemungkinan penerapan materi bimtek dalam praktek		29	1		
Kemudahan materi bimtek untuk dicerna		28	2		
Kualitas alat bantu dan media		27	3		
Pengaturan jadwal waktu Workshop		28	2		
Kecukupan waktu		28	2		
Kondisi pelaksanaan bimtek (ruangan, akomodasi dan konsumsi)		29	1		

Keterangan :

SM : Sangat Memuaskan
M : Memuaskan
CM : Cukup Memuaskan
KM : Kurang Memuaskan
TM : Tidak Memuaskan

Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa isi program acara Bimbingan Teknis tersebut telah tercapai dengan kriteria-kriteria seperti diatas. Dan mayoritas peserta memberikan penilaian dengan memuaskan. dari kuesioner yang kami berikan. Dengan demikian pelaksanaan program Bimbingan Teknis ini dapat dikatakan berhasil dan memenuhi kebutuhan peserta.

Seperi bimbingan teknis yang pernah dilaksanakan DPRD propinsi lain dengan tema pelatihan yang berbeda, hasil pelatihan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Universitas Budi Luhur mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja. Hasil data tersebut diperkuat dengan DPRD Gorontalo Melakukan beberapa hal kegiatan seperti melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah serta

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.

SIMPULAN

Secara umum pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini telah berjalan baik, isi program bimbingan teknis yang kami berikan secara keseluruhan telah memuaskan peserta dan dapat membantu proses pembelajaran. Narasumber yang kami hadirkan secara keseluruhan dengan baik menyiapkan segala materinya sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta. Dalam rangka upaya kinerja anggota DPRD, tentunya kegiatan semacam ini harus terus dilakukan dengan memperhatikan topik terkini sehingga secara implementatif peserta dapat memperoleh pengetahuan baru. Penting untuk selalu memperhatikan kualitas dan peningkatan pelayanan sehingga penyelenggaraan dapat berjalan lebih baik lagi.

Kegiatan bimtek ini menambah wawasan para Pimpinan dan Anggota DPRD untuk lebih profesional dan proaktif dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai wakil rakyat dan penyelenggara pemerintahan daerah bagi kemanfaatan masyarakat. Melalui workshop dan Bimbingan Teknis ini Pimpinan dan anggota DPRD memberi manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan kami untuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Workshop dan Bimtek yang telah dilaksanakan dengan lancar sampai hari terakhir dan diwarnai dengan diskusi aktif antara Pimpinan dan Anggota DPRD bersama para narasumber.

Permasalahan yang kerap dihadapi adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan, hal ini terkait perjalanan dan penginapan peserta selama pelatihan. Apabila pelatihan dilaksanakan di Gorontalo, nara sumber yang dibuthkan belum ada sedangkan nara sumber yang tersedia keberatan jika harus ke Gorontalo terkait dengan padatnya pekerjaan yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada PT PUSDIRA sebagai lembaga pendidikan yang sudah membantu Universitas Budi Luhur dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini dari mulai persiapan hingga pelaksanaan bimtek selesai. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Badan Pengawas Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas pemberian ijin kepada kami untuk menjadi fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengikuti bimbingan teknis. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriastuti, K. T. P. (2017). Pengaruh Kebijakan Bimtek Terhadap Kinerja Legislasi DPRD Kabupaten Bangli. *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–7.
- Ekaningsih, A. S. (2013). Peran Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan). *Jurnal Borneo Administrator*, 9(2), 189–207.
- Kristanti, T. (2009). Integrasi Enterprise (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan “X”). *Jurnal Sistem Informasi*, 4(1), 17–32.
- Mangkin, B. R. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bimtek dalam Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Universitas Sanata Dharma.
- Ray Septianis Kartika dan Garsy Simorangkir (2019). Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Matra Pembaharuan, Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol. 3 No.2

- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 83–93.
- Sugiyantari, D., Titisari, P., & Sumani, S. (2018). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Cloud pada Pemerintah Kabupaten Jember. *BISMA*, 12(1), 106–118.
- Komang Tri Putri Andriastuti Putu Ngurah Suyatnayasa I Wayan Wesna Astara, (2017). Pengaruh Kebijakan Bimbingan Teknis Terhadap Kinerja Legislasi Dprd Kabupaten Bangli. *Public Inspiration, Jurnal Administrasi Public*